

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN

2025

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**

Jl. Letkol Isdiman No.17A Telp (0281) 8902091
PURBALINGGA 53313



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 050.1.2/038/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
PURBALINGGA,**

- Menimbang : a. Berdasarkan Pasal 11 ayat 3, Pasal 16 ayat 2 dan Pasal 125 poin a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, menegaskan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD;
- b. Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun perlu disusun Renja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Estándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 85);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja Tahun 2025) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dengan susunan Tim sebagaimana terlampir;

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja Tahun 2025) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagaimana diktum KESATU adalah :

1. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Mengkaji dan Mengevaluasi Renja Tahun n-2 termasuk capaian dan kemajuannya;
3. Mengkoordinasikan dan Menyusun Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
4. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait;
5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan;
6. Mengkoordinasikan dan Menyusun Rancangan dan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Purbalingga
Pada tanggal : 6 Desember 2023

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650519 198803 2006

NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris	
2.	Kabid Informatika	
3.	Kabid ITSP	
4.	Kabid IKP	

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
Nomor : 050.1.2/ / Tahun 2023
Tanggal : 6 Desember 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
2.	Sigit Dwi Pramono, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris I
3.	Marlin Dwi Sulandari, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris II
4.	Baryati, S.Kom.	Kepala Bidang Informatika	Anggota
5.	Sapto Suhardiyo, S.STP, ST.	Kepala Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian	Anggota
6.	Warkhan Agus, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	Anggota
7.	Dewi Astuti, S.Psi.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Luky Hidayat, S.T., M.Eng.	Sub Koordinator/Fungsional Manggala Informatika Ahli Muda	Anggota
9.	Eko Wahyu Cahya, S.Kom.	Sub Koordinator/Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
10.	Dra. Jeni Preandini, M.Si.	Sub Koordinator/Fungsional Statistisi Ahli Muda	Anggota

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Titi Suryani, S.Sos.	Sub Koordinator/Fungsional Sandiman Ahli Muda	Anggota
12.	Edy Sumartono, S.H.	Sub Koordinator/Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
13.	Lejar Hatininggar, S.Sos	Sub Koordinator/Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
14.	Riyang Herlambang, S.Kom.	Sub Koordinator/Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
15.	Rusiyati, S.Sos.	Fungsional Perencanaan Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
16.	Tris Dianasari, S.Si.	Fungsional Ahli Pertama- Statistisi	Anggota

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650519 198803 2006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Renja disusun berpedoman kepada 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen pedoman yang dimaksud diantaranya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD dan RKPD.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan Rancangan Akhir RKPD, pelaksanaan forum Dinas Komunikasi dan Informatika, hingga pada penyempurnaan berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD. Proses ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Penyusunannya juga berpedoman pada Renja Kementerian/Lembaga terkait dan Renja Dinkominfo Provinsi terkait.

Renja Dinkominfo sebagai dokumen perencanaan tahunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Anggaran

Sementara (PPAS). Selain itu juga sebagai implementasi pelaksanaan Rencana strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

- 1 Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang telah diubah menjadi PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Mmabahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 2 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 50 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Purbalingga tahun 2005;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keunagan Daerah;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No, 12 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga (RPJMD) 2021-2026;
- 9 Surat Keputusan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Purbalingga;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 11 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1 Menentukan arah kebijakan pembangunan komunikasi, informasi publik, informatika, infrastruktur TIK, statistik dan persandian tahun 2025;
- 2 Mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas Pembangunan komunikasi, informasi publik, informatika, infrastruktur TIK, statistik dan persandian tahun 2025 yang sinergis dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- 1 Memberikan landasan operasional bagi unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- 2 Menjabarkan renstra Dinkominfo Tahun 2021-2026 sekaligus sinkronisasi dengan kebijakan dan sasaran rencana kerja Pemerintah Daerah;
- 3 Pedoman/acuan bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan tahun 2025;
- 4 Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- 5 Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan komunikasi, informasi publik, informatika, infrastruktur TIK, statistik dan persandian antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga mengacu sistematika sebagaimana pedoman Pemendagri No 86 Tahun 2017, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Dearah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Peranagkat Dearah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja secara umum berisi capaian kinerja program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinkominfo Kabupaten Purbalingga 2021–2026. Secara umum capaian kinerja program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga tahun 2023 dapat dilaksanakan dan mendekati bahkan ada yang melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga merupakan SKPD yang disahkan melalui Perda No. 12 Tahun 2016 sebagai pelaksana urusan wajib. Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan 5 Program dan 13 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan 5 program dan 14 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2024 memiliki 5 Program, 13 kegiatan yang terbagi menjadi 33 Sub Kegiatan dengan Anggaran Secara Keseluruhan Tahun 2024 adalah Sebesar Rp. 8.280.539.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Anggaran Tahun 2024 pada Dinkominfo Kab. Purbalingga mengalami penambahan sebesar Rp.1.547.503.000,- (Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp.6.733.036.000,-) atau sebesar 22,98% dari Anggaran Perubahan 2023.

Adapun format matrik rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinkominfo s/d Bulan April Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Bln. April Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi%		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-Persentase OPD yang memiliki website aktif -Cakupan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terpublikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	29,74%	29,74%
2	16	02	201		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	29,74%	29,74%
2	16	02	201	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	153 Dokumen	100%	153 Dokumen	153 Dokumen	100%	153 Dokumen	36.67%	36.67%

[illegible]

2	20	02	201	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	280 dokumen	100%	280 dokumen	280 dokumen	100%	280 dokumen	41.25%	41.25%
2	20	02	201	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%	1 unit	79.04%	79.04%
2	20	02	201	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	29 dokumen	100%	29 dokumen	29 dokumen	100%	29 dokumen	62.35%	62.35%
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									
2	21	02	201		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase operasional jaring komunikasi Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	24,44%	62.35%
2	21	02	201	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	14.79%	14.79%
2	21	02	201	02	Penatalaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	34.09%	34.09%
2	21	02	202		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase operasional jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35,38%	35,38%
2	21	02	202	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 PD	100%	1 PD	1 PD	100%	1 PD	35.58%	35.58%
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18,07%	18,07%
X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0.0%	0.0%

X	XX	01	201	02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	39.76%	100%
X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	57,57%	57,57%
X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bln	100%	42 Orang/Bln	42 Orang/Bln	100%	42 Orang/Bln	58.40%	100%
X	XX	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	100%	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	24 Dokumen	12.92%	100%
X	XX	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	5.68%	100%
X	XX	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	18,57%	18,57%
X	XX	01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	100%	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	18.98%	100%
X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,94%	4,94%
X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0.00%	100%
X	XX	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	3.26%	100%
X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	31.23%	100%
X	XX	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	0.00%	100%
X	XX	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	0.00%
X	XX	01	203	02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0.00%	0.00%

X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32,41%	32,41%
X	XX	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	100%
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	100%
X	XX	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	100%
X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	100%
X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	44,62%	44,62%
X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	100%	13 Unit	13 Unit	100%	13 Unit	100%	100%
X	XX	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	100%	100%
X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%	100%

Dari tabel capaian indikator kinerja program yang mendukung sasaran Dinkominfo dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Realisasi Program dan kegiatan pada indikator program pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara keseluruhan dapat tercapai. Pada kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik realisasi 100%. Pengelolaan Media Komunikasi Publik terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.220.641 (0,58%) yang merupakan sisa anggaran berupa penghentian sewa server hosting purbalingganews.id;
Secara umum pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran.
2. Realisasi Program dan kegiatan pada indikator program pengelolaan aplikasi Informatika secara keseluruhan dapat tercapai. Pada kegiatan Pengelolaan nama domain dan Pengelolaan e-governance di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi 99,65%.
Untuk pencapaian penerapan SID desa dan Desa.id di Kabupaten Purbalingga
 - a. SID Desa 34,82%.
 - b. Persentase Update SID 58,97%.
 - c. Desa.id 56,25%.
 - d. Persentase Update desa.id 40,47%.

Selain capaian kinerja yang efisien juga diperoleh penghargaan di bidang Informatika terkait pelaksanaan kegiatannya diantaranya:

- a. Penggunaan PSE;
 - b. Pemanfaatan PDN;
 - c. Pemanfaatan mail.go.id beserta surat sekda disertai petunjuk penggunaan ke OPD untuk penggunaan mail.go.id bagi ASN & Perangkat Desa;
 - d. Pemanfaatan multi domain (apabila memungkinkan);
 - e. Penggunaan SI Cantik;
 - f. Penggunaan SRIKANDI;
 - g. 24 aplikasi telah dibuat di tahun 2023 diharapkan tetap solid.
3. Realisasi Program dan kegiatan pada indikator program penyelenggaraan statistik sektoral secara keseluruhan dapat tercapai. Pada sub kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota realisasi 96,80%. Pada sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral tercapai realisasi 99,89%. Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah tercapai realisasi 99,99%. Pada sub kegiatan Pengembangan Infrastruktur tercapai

realisasi 100%. Pada sub kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tercapai realisasi 99,99%. Pada sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tercapai realisasi 99,98%.

Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tupoksinya hingga bulan Juni 2024 telah memenuhi bahkan melebihi target kinerja yang sudah ditetapkan. Disamping capaian kinerja program terdapat capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah/PAD di Tahun 2023 dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan rincian sebagai berikut:

Target PAD Tahun 2023	Realisasi PAD Tahun 2023	Target PAD Tahun 2024	Persentase Realisasi PAD Tahun 2023
Rp.900.000.000,-	Rp1.136.840.625,-	Rp.0,-	126,32%

Selama Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengukuhkan Pendapatan Penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp.1.136.840.625,-. Jumlah ini melebihi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp.900.000.000,- atau berada pada capaian **realisasi 126,32%**, atau meningkat sebesar 21.96% dari pendapatan Tahun 2022. Pada Tahun 2023 melebihi target karena ada penambahan provider yaitu Smartfren dari Tower Bersama serta pembayaran keterlambatan dari PT.Solusi Tunas Pratama (STP) Tahun 2022.

Per Tanggal 5 Januari Tahun 2024 Dinkominfo Kabupaten Purbalingga tidak lagi sebagai penerima PAD Retribusi Menara Telekomunikasi berdasarkan Undang-undang HKPD/Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Nomor: 1 Tahun 2022 Tanggal 5 Januari 2022 Pasal 187 huruf a dan b. Retribusi Pengendalian Menara masih dapat dipungut sesuai Perda berdasarkan Undang-undang PDRD/Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih tetap berlaku paling lama 2 tahun sejak tanggal diundangkannya UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 per tanggal 5 Januari 2022.

Capaian Prestasi Kinerja Dinkominfo Tahun Aggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pengelolaan *e-Government* Bidang Informatika;
 - a. Dinkominfo Kabupaten Purbalingga menerima Penghargaan dari Kemenkominfo sebagai **Instansi Terbaik Ketiga** untuk Instansi Teraktif dalam Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik Tingkat Nasional Tahun 2023.
 - b. Capaian Indeks-Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kabupaten Purbalingga 3 Tahun terakhir: _

1. Capaian Indeks SPBE Tahun 2021 sebesar 2.23
2. Capaian Indeks SPBE Tahun 2022 sebesar 3.20 Peringkat 10 tingkat Provinsi Jawa Tengah dan peringkat 1 se-eks Karesidenan Banyumas
3. Capaian **Indeks SPBE Tahun 2023** sebesar **3.83**

Dengan Capaian Indeks SPBE 3.83 (**Peringkat 6 tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Peringkat 1 se-eks Karesidenan Banyumas**)

Kinerja Dinkominfo yang optimal ditunjukkan dengan adanya capaian Indeks SPBE yang semakin meningkat. Hal ini terjadi karena adanya kolaborasi dan sinergitas Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jateng, dan antar OPD diantaranya dalam hal memanfaatkan Pusat Data Nasional Kemenkominfo.

2. **Urusan Statistik Bidang ITSP:**

- Dinkominfo Kabupaten Purbalingga mencapai peringkat **KELEMBAGAAN TERBAIK DI KORWIL III Tingkat Provinsi** dari 34 Kabupaten Kota dari sisi Pengelolaan. Hal ini tercapai karena kinerja yang optimal dan kolaborasi dengan Bappelibangda, DPUPR dan BPS Purbalingga.
- Indeks Satu Data Indonesia/SDI untuk Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 naik 70% dibandingkan dengan Indeks SDI Tahun 2022.
- Bidang ITSP juga telah Menyusun Buku Meta Data yang telah di ISBN-kan, disamping telah mengisi data sektoral sebanyak hampir 2.000 data yang dilakukan intern Dinkominfo Kab. Purbalingga.
- Kegiatan **Geospasial**, dalam pengisian data base spasial sudah **“Berwarna Hijau”** yang menandakan keterisian data **“Optimal”**. Hal ini didukung dengan kegiatan di Geospasial dengan menyusun juklak-juknis pengisian geospasial serta *sharing knowledge* yang diselenggarakan di Tahun Anggaran 2024. Akun Simojang Kabupaten Purbalingga dapat diakses melalui <https://simojang.big.go.id/>.

3. **Urusan Persandian Bidang ITSP:**

Tingkat Maturity Penanganan Insiden/TMPI yang merupakan asistensi dengan BSSN masuk dalam kategori masih rendah senilai 1,27 dengan keterangan:

- a. Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) per Desember 2023 telah terbit sebanyak 218 Sertifikat Elektronik.

4. **Urusan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang IKP:**

- a. Dinkominfo Kab. Purbalingga telah mengikuti Penilaian Keterbukaan Informasi Publik dengan Predikat **Kabupaten Informatif** di tingkat Provinsi Jateng dengan nilai 92,95.
- b. Anugerah AMH, Dinkominfo Kabupaten Purbalingga **masuk dalam Nominasi** Kategori *In House Magazine* Tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia.
- c. Terselenggaranya Pementasan FK Metra Tingkat Provinsi Jateng di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dengan sukses pada tanggal 24 Juli 2023.

5. Dinkominfo Kabupaten Purbalingga meraih **peringkat pertama (online) di tingkat Nasional** pada acara National Cyber Exercise (Indonesia Cross Sectoral Cyber Exercise # 3: Regional Jateng-DIY) yang diadakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara/BSSN pada Bulan Juli 2024.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2023 capaian kinerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sesuai dengan target yang sudah diakomodir pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026. Dinkominfo Kabupaten Purbalingga mengampu enam indikator, dimana semuanya berstatus tercapai bahkan ada lima indikator yang melampaui target yang sudah ditentukan. Kelima indikator yang dimaksud diantaranya Indeks SPBE, Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah, Tingkat keamanan Informasi Daerah, Nilai Kematangan Perangkat Daerah, Nilai Sakip Dinkominfo Kabupaten Purbalingga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Dinkominfo mempunyai fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
- 2. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
- 3. Pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
- 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik,

5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinkominfo Kabupaten Purbalingga menghadapi beberapa faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian antara lain adalah:

1. Kesiapan aplikasi dan data dukungnya dalam pengintegrasian, sehingga masih sedikitnya aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi.
2. Keterbatasan jumlah infrastruktur dan peralatan, baik fasilitas publik, kecamatan, dan kelurahan yang belum terhubung. Peralatan infrastruktur radio yang rusak dan tidak memenuhi standar.
3. Banyaknya akun media sosial dan layanan aduan masyarakat yang harus dikelola, sedangkan Sumber Daya manusia yang berkompeten sangat terbatas.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya diantaranya:

1. Mengupayakan penyesuaian data-data pendukung aplikasi agar siap untuk diintegrasikan.
2. Memaksimalkan infrastruktur yang dimiliki oleh pihak ketiga.
3. Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan yang rusak.
4. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang sudah ada dengan meningkatkan kualitas SDM.

Kinerja pelayanan Dinkominfo selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga

[illegible]

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasi onal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	Thn 2023	Thn 2024 s.d. April	Thn 2024	Thn 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	disediaka oleh Dinkominfo											
3	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinntegrasi		45	45	45	46	47	45	45	45	46	
4	Jumlah kegiatan (<i>event</i>) Perangkat Daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah		75	75	76	77	78	75	30	76	77	
5	Jumlah kegiatan (<i>event</i>) Perangkat Daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015		75	75	76	77	78	75	30	76	77	
6	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		195	195	195	196	196	195	195	195	196	
7	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan		45	45	45	45	45	45	45	45	45	
8	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementsikan secara elektronik		13	13	14	15	16	13	13	14	15	
9	Jumlah Layanan SPBE secara elektronik		268	268	269	270	271	268	268	269	270	
10	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		16	16	16	16	16	16	16	16	16	
11	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan		268	268	269	270	271	268	268	269	270	
12	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		42	42	43	44	45	40	44	43	44	

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasi onal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	Thn 2023	Thn 2024 s.d. April	Thn 2024	Thn 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>smart city</i>		22	22	23	24	25	19	23	23	24	
15	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinkominfo		17	17	17	18	19	17	17	17	18	
16	Jumlah komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah		14	14	14	14	14	14	14	14	14	
17	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah sesuai dengan strategi komunikasi		76	76	77	78	79	76	50	77	78	
18	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi SOP		875	875	876	877	878	500	876	876	877	
19	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik PPID		875	875	876	877	878	500	876	876	877	
20	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan akses Internet yang berkualitas yang disediakan Dinkominfo		39	39	40	41	42	40	41	40	41	
21	Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang Sesuai Standar Tahun 2023		39	39	40	41	42	40	41	40	41	
22	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan		47	47	48	49	50	47	48	47	48	
23	Jumlah sistem elektronik website desa yang disediakan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga		127	127	127	127	127	127	127	127	127	
24	Jumlah Perangkat Daerah yang Menyimpan Data di Kabupaten		26	26	25	24	23	26	25	26	25	
25	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		47	47	47	48	49	47	47	47	47	
26	Jumlah metadata indikator OPD/Instansi		33	33	34	35	36	33	34	33	34	
27	Jumlah sistem elektronik yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten purbalingga		27	27	28	29	30	27	28	27	28	
28	Program Kerja Layanan Keamanan informasi		7	7	7	7	7	7	7	7	7	
29	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral		67	67	68	69	70	67	45	68	69	

[illegible]

Adapun hasil analisis kinerja pelayanan tiap-tiap kegiatan di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga terbukti dengan jumlah layanan publik yang ada dan lokasinya dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.1 Lokasi Website & Aplikasi

List Website & Aplikasi Lain		
NO	LOKASI	Nama Aplikasi
	PDN	<div>1. SIMANTAP</div> <div>2. Purbalingga Memikat</div> <div>3. E-Sakip</div> <div>4. E-Kepegawaian</div> <div>5. E-Kinerja</div> <div>6. Geoportal</div> <div>7. CBT BKPSDM</div> <div>8. Dilan</div> <div>9. Infowisata</div> <div>10. MUI</div> <div>11. Korpri</div> <div>12. e-SPPD</div> <div>13. Agendadinkopukm</div> <div>14. PPID</div>
	Lokal	<div>1. Mail Purbalingga</div> <div>2. Aduan CSIRT</div> <div>3. CSIRT Purbalingga</div> <div>4. BanggaMacapat</div> <div>5. Simpel</div> <div>6. Bakeuda Retribusi</div>

Tabel 2.2.2
DAFTAR LAYANAN PUBLIK ONLINE DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

No	Aplikasi	OPD	Site
1	Syantika (Sistem Layanan Administrasi Kepegawaian)	DINKOMINFO	https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.purbalinggakab.santika
2	Satu Data Purbalingga (Portal Satu Data Pemkab Purbalingga)	DINKOMINFO	https://data.purbalinggakab.go.id/
3	DILAN-APP (Digital Layanan Pengajuan Aplikasi)	DINKOMINFO	https://dilan.purbalinggakab.go.id/
4	MATURBUP Versi Android (Media Aspirasi Tanya Jawab untuk Rakyat Bupati Purbalingga)	DINKOMINFO	https://apkpure.com/id/matur-bupati-purbalingga/id.go.purbalinggakab.maturbup.maturbup
5	MATURBUP PURBALINGGA (Media Aspirasi Tanya Jawab untuk Rakyat Bupati Purbalingga)	DINKOMINFO	https://maturbup.purbalinggakab.go.id/
6	SangJuara (Aplikasi Administrasi Kejuaraan Pemkab Purbalingga)	DINKOMINFO	ikps://sangjuara.purbalinggakab.go.id/
7	SIMPSPBE (Sistem Informasi SPBE Purbalingga)	DINKOMINFO	https://simpspe.purbalinggakab.go.id/
8	Portal Kecamatan (Portal website kecamatan)	DINKOMINFO	https://portalkecamatan.purbalinggakab.go.id/
9	Sijoli (Sistem informasi Jaringan Online)	DINKOMINFO	https://sijoli.purbalinggakab.go.id/
10	Monitoring Website (Monitoring Websile Milik Dinkominfo)	DINKOMINFO	https://monitoringwebsite.purbalinggakab.go.id/dashboard
11	Simita (Sistem manajemen Aset Jaringan)	DINKOMINFO	https://simita.purbalinggakab.go.id/lauth
12	Pendaftaran Online RSUD Purbalingga (Aplikasi Android Pendaftaran Online RSUD Purbalingga)	RSUD GOETENG	https://apkpure.com/id/pendaftaran-online-rsud-purbalingga/rstudio.pendaftaronline

13	Aplikasi Android SiLapar Buku(Aplikasi Pesan Antar Buku)	DINARPUS	https://apkpure.com/id/silapar-buku-purbalingga/app.finasmart.kpadpurbalingga
14	Aplikasi Android E-Bangga (Aplikasi Elektronik Buku Purbalingga)	DINARPUS	https://apkpure.com/id/e-bangga-elektro-k-buku-purbalingga/id.kubuku.kbk10905b0
15	Aplikasi TKA (Aplikasi Pengajuan Tenaga Kerja Asing)	DINAKER	https://tka-online.kemnaker.go.id/
16	Cegah Stunting (Website Aplikasi Cegah Stunting)	DALDUK	https://cegahstunting.purbalinggakab.go.id/
17	Dapodik (Data Pokok Kependidikan)	KEMDIKBUD	https://dapo.kemdikbud.go.id/
18	DigiT (sistem Perbendaharaan Anggaran Negara)	BAKEUDA	https://spanint.kemenkeu.go.id/spaninMatetest/app/
19	E- Kepegawaian (Aplikasi data Kepegawaian Pemkab Purbalingga)	BKPPD	http://e-kepegawaian.purbalinggakab.go.id/
20	e-Kinerja (Sistem informasi Kinerja Pegawai)	BKPPD	https://e-kinerja.purbalinggakab.go.id/
21	E-Makaryo (Aplikasi bursa Kerja Jawa Tengah)	SNAKER PROV	https://bursakerja.jatengprov.go.id/
22	E-Monev Simbangda Kab. Purbalingga (Aplikasi e-monev Pembangunan)	SETDA PEMBANGUNAN	https://simbangda.purbalinggakab.go.id/
23	E-PRESENSI (aplikasi pengelolaan Presensi penghitung TPP)	BKPPD	https://e-presensi.purbalinggakab.go.id/
24	E-SPPT-SIMPBB (Sistem Informasi Pajak Bumi Bangunan)	BAKEUDA	http://epbb.purbalinggakab.go.id/Jogin
25	E-SPTPD (Aplikasi Penerimaan Pajak)	BAKEUDA	http://epbb.purbalinggakab.go.id/Jogin
26	INFO COVID-19 (Aplikasi Informasi covid-19 Purbalingga)	DINKES	https://corona.purbalinggakab.go.id/
27	Info Wisata Purbalingga (Aplikasi Info Wisata Purbalingga)	DINPORAPAR	http://infowisata.purbalinggakab.go.id/
28	Layanan Manajemen Keuangan (Aplikasi Keuangan Daerah)	BAKEUDA	https://simkeu-purbalingga.simdacloud.id/#/client/CSIMKEU
29	Layanan Manajemen Penganggaran (Aplikasi Keuangan Daerah)	BAKEUDA	http://simdoud.id/purbalinggakab/
30	Layanan Manajemen Perencanaan (SIM Perencanaan Penganggaran Pelaporan)	BAPELITBANGDA	http://202.46.1.88/simral/
31	Monitoring PSC119 (Aplikasi Kegawatdaruratan Medik)	DINKES	https://admin.psc119purbalingga.com/Jogin
32	NERACA (Aplikasi Neraca Pangan Daerah)	DKPP	https://neraca.aksespangan.com/Jogin
33	Pelatihan Kemnaker (Aplikasi pengajuan Pelatihan Tenaga Kerja)	DINAKER	https://pelatihan.kemnaker.go.id/
34	Pelayanan E-KTP Kab. Purbalingga (Website Pelayanan E-KTP Dukcapil)	DUKCAPIL	http://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/

35	Sistem Perizinan Online (Aplikasi Perizinan Online Single	DPMP TSP	https://ss.go.id/
----	---	----------	---

Selain capaian kinerja pelayanan, Dinkominfo juga memiliki beberapa inovasi. Inovasi yang telah dilakukan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga antara lain:

1. **Koresponden Liputan Produk UMKM Purbalingga** (KrupuG)
2. **GEO-PURBA** (Geospasial Purbalingga)
3. **ELASTIK** (E-Learning Sertifikat Elektronik
4. **e-Metadata** (ebook Metadata Indikator Statistik Sektoral)
5. **TATAKOMINFO** (Optimalisasi Publikasi Melalui Standarisasi Konten Digital Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga)
6. **E-Majalah Derap Perwira**
7. **Dinkominfo Menyapa**
8. **Ekovis** (Optimalisasi Publikasi Media Visual Menggunakan Ekosistem Digital di Dinkominfo Purbalingga)
9. **WADUK SEMFOR** (Wadah Edukasi Sadar Keamanan Informasi)
10. **PAMER INFO** (Podcast dan Media Center Dinkominfo)
11. **BAJU SEJASNI** (Berkah Jum'at, Sehat Jasmani Rohani)
12. **Website Bangga macapat**
13. **OMMEGA** (Optimalisasi Monitoring Media Massa Online Menggunakan Google Alerts)
14. **Sistem Informasi Digitalisasi Desa**
15. **JUBAH BARU** (Jumat Barokah Bahagia Berbagi Ilmu)
16. **Optimus Prime** (Optimalisasi Penerapan SSO Melalui Aplikasi Manajemen e-Akun Berbasis Website)
17. **SIMPANDATA** (Sistem Penyimpanan Data Terpusat)

Analisis Kinerja Pelayanan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada fungsi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, hasil pengukuran dimaksud merupakan hasil penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Hasil perhitungan dalam pengukuran kinerja keuangan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga diperoleh rata-rata capaian **96,17%**, nilai capaian tertinggi sebesar **100 %** diperoleh pada kegiatan berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Adiministrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
8. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengembangan Infrastruktur

Adapun kegiatan-kegiatan lain di Dinkominfo juga penyerapannya sangatlah baik yaitu dari 96,82% s.d. 99,99% sehingga anggaran bisa terserap dan digunakan secara optimal pada kegiatan yang dilaksanakan. Hanya pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik yang hanya mencapai 70,63% merupakan *at cost*/tidak bisa dibelanjakan karena semua kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik selama tahun 2023 sudah terpenuhi. Namun demikian masih ada juga kegiatan yang memang harus dilakukan penghematan anggaran dan adanya *refocussing* anggaran.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor: 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga. Serta Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan peraturan di atas yang menjadi dasar bagi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga untuk terus berupaya bekerja optimal sehingga dapat meraih target kinerja yang membanggakan. Hasil kinerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga yang membanggakan karena

didukung kekuatan yang dimiliki di intern Dinkominfo Kabupaten Purbalingga diantaranya:

1. Pimpinan yang baik dan senantiasa memberi contoh serta motivasi kepada bawahan untuk bekerja keras, cerdas dan ikhlas.
2. Sumber daya manusia yang dimiliki Dinkominfo Kabupaten Purbalingga terhitung cukup memadai dari segi kualitas walaupun masih terbatasnya sarana pengembangan SDM yang ada, sedangkan dari segi kuantitas masih jauh dari cukup untuk menjalankan tupoksi yang ada.
3. Semangat yang tinggi untuk bekerja optimal baik dari pimpinan hingga seluruh staf Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sehingga mampu meraih beberapa prestasi membanggakan baik di tingkat Provinsi bahkan tingkat Nasional.

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas Dinkominfo Kabupaten Purbalingga terdapat beberapa isu penting diantaranya :

1. PENDAMPINGAN BRIN.

Nota kesepakatan bersama BRIN terkait kegiatan peningkatan SDM (*transfer knowledge*) untuk urusan statistik dan persandian (keamanan siber) kesepakatan ini dimulai Tahun 2024- 2029.

Kesepakatan menggunakan *sharing cost*, BRIN menyediakan para mentor dan Dinkominfo terkait tata tempat, makan-minum, dan penyediaan internet saat pelatihan.

2. PENDAMPINGAN SMART CITY.

Program pendampingan penyusunan dokumen *master plan smart city* dari Kemenkominfo.

3. KERJASAMA DENGAN BALAI PENINGKATAN SDM YOGJAKARTA (wilayah BPSDMD wilayah DIY, Jateng, dan Bali)

a. *Digital Entrepreneurship Academy* untuk 300 peserta dengan sasaran pelaku UMKM;

b. *Thematic Academy* untuk pelaku wisata 120 peserta;

c. *Vocational School Graduate Academy*, pelatihan digital untuk lulusan SLTA/ sederajat dengan peserta 70 orang

4. Nota kesepakatan dengan BIG.

Pelatihan Geospasial dan pembuatan *Road Map* dan SOP pelaksanaan Geospasial di Purbalingga.

(Nota kesepakatan menggunakan *sharing cost* dengan BIG, seperti yg dilakukan bersama BRIN.

5. Pemerintah Kabupaten dan Badan Publik sudah mencapai tahap

Informatif dengan nilai dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah pada akhir tahun 2023 sebesar 92,95. Optimalisasi fungsi pelayanan informasi publik sesuai tuntutan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih perlu terus ditingkatkan. Pada penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID masih perlu ditingkatkan guna peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

6. Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Purbalingga Tahun 2024, sesuai surat edaran bupati purbalingga tentang pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 antara lain:

Peningkatan Pelayanan Publik, dengan fokus pada:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja melalui pengembangan regulasi dan sistem penunjang kinerja
- b. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui:
 - 1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan
 - 2) Membangun lingkungan budaya birokrasi yang bersih dan melayani
- c. Peningkatan Inovasi pelayanan publik, antara lain melalui:
 - 1) Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi.
 - 2) Penguatan Desa, dengan:
 - a. Optimalisasi Potensi Desa melalui Pengembangan Desa Tematik,
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Penguatan Peran lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah;
 - c. Peningkatan tertib administrasi tatakelola pemerintahan desa melalui;
 - 1) digitalisasi desa
 - 2) pembinaan dan pengawasan administrasi desa
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana desa

7. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik/SPBE sudah mencapai nilai indeks sangat baik, namun tingkat kematangan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE merupakan indikator terendah. Hal ini menggambarkan kinerja yang masih perlu dipacu untuk lebih meningkatkan perannya dalam manajemen SPBE terutama dalam

audit infrastrukturnya. Di sisi lain kinerja optimal Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sangat signifikan dalam pelayanan publik.

8. Gambaran pelaksanaan SPBE di internal Kabupaten Purbalingga menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja. Namun disisi lain, Kabupaten Purbalingga masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM. Pada Aspek manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM, dapat dimulai dengan melakukan kegiatan yang terencana serta membentuk tim yang mendokumentasikan seluruh pengetahuan dan perubahan yang dilakukan di lingkup penerapan SPBE di Kabupaten Purbalingga. Diharapkan juga dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target. Proses unggah bukti dukung perlu dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan indikator yang diminta agar tidak terlalu banyak bukti dukung dan kurang relevan dengan indikator yang ditanyakan.
9. Indek Keamanan Informasi masih rendah/kurangnya dukungan infrastruktur keamanan informasi baik *hardware* maupun *soft ware*;
10. Pengelolaan data statistik sektoral yang belum maksimal dikarenakan OPD tidak menyajikan data secara update dan juga belum adanya revisi Peraturan Bupati tentang Satu Data Purbalingga yang berisi satuan data.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan gambaran tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga ditemui beberapa permasalahan dan hambatan dalam menjalankannya. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Perlunya peningkatan optimalisasi penerapan kebijakan internal, tata kelola dan layanan SPBE;
2. Perlunya peningkatan efektivitas penerapan strategi dan pemanfaatan media komunikasi publik;
3. Perlunya peningkatan sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memadai;
4. Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah;
5. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral;

6. Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi;
7. Perlunya peningkatan upaya mewujudkan *single data* dan penguatan pengelolaan data statistik sektoral;
8. Perlunya peningkatan keamanan informasi sesuai sertifikasi standar yang ditentukan;
9. Perlunya peralatan pendukung utama dan wajib persandian sesuai rekomendasi standar keamanan informasi;
10. Sarana dan Prasarana pendukung sesuai spesifikasi yang dibutuhkan masih kurang memadai;

2.3.3 Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, dan Terhadap Capaian Nasional/Internasional

Perumusan indikator pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinkominfo Kabupaten Purbalingga pada dokumen RPJMD belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian. Hal tersebut diantaranya disebabkan belum adanya fokus, sinkronisasi dan koordinasi yang maksimal antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota serta belum maksimal menjadi prioritas pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam mendukung kinerja program pembangunan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan antara lain:

1. Kapasitas, kualitas, kuantitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal;
2. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
3. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai.

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Dalam Upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinkominfo, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinkominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Dinominfo Kabupaten Purbalingga.

1. Tantangan:
 - a. Kesenjangan informasi di masyarakat Kabupaten Purbalingga;
 - b. Pesatnya perkembangan TIK;

- c. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum memadai;
- d. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat Kabupaten Purbalingga terhadap TIK;
- e. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui *Single Data System*;
- f. Tuntutan keterbukaan data dan informasi;
- g. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat kendala yang berpengaruh terhadap beberapa hal di kegiatan bidang IKP antara lain:

- a) Kurangnya peralatan ‘tempur’ yang memadai terutama peralatan liputan-liputan;
- b) Keterbatasan pelaksanaan rapat dan koordinasi baik intern kabupaten maupun koordinasi ke Provinsi dan ke Pemerintah Pusat (makan/minum, narasumber, dan sppd);
- c) Keterbatasan anggaran lembur dan uang saku perjalanan dalam daerah (banyaknya kegiatan peliputan di wilayah, baik hari kerja maupun hari libur).

Selain capaian-capaian di atas ditemui kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Informatika, diantaranya:

- 1. Pembuatan aplikasi dilakukan secara individu dikarenakan banyaknya permintaan dari OPD sedangkan tenaga teknis di Informatika masih terbatas;
- 2. Diharapkan kepada semua staf paham aplikasi dan dapat menjelaskan jika ada yang OPD/masyarakat yang berkonsultasi;
- 3. Email bermasalah (terdeteksi spam) sedang diselesaikan menggunakan zimbra mail server;

Kendala di bidang Infrastruktur teknologi informasi komunikasi, statistik dan persandian/ITSP diantaranya:

- 1. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana pengolahan data yang mengakibatkan lambatnya Distribusi serta Kinerja Pengamanan Informasi
- 2. Perawatan Jaringan Telepon PABX di Lingkungan Setda masih menjadi tanggung jawab Dinkominfo sehingga mengurangi alokasi anggaran kegiatan persandian
- 3. Masih kurangnya kesadaran terkait keamanan informasi,
- 4. Sarpras penunjang kegiatan pengamanan informasi belum memadai,

5. Kurangnya kompetensi pengelola keamanan informasi,
6. Belum Operasionalnya (Launching) Computer Security Incident Response Team (CSIRT),
7. Belum optimalnya Indeks KAMI (Keamanan Informasi), Evaluasi Persandian dan Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI)
8. Banyaknya akuisisi atau pemindahan kepemilikan menara antar provider sebenarnya termasuk untuk kendala target Realisasi PAD tahun 2022 yg tidak tercapai 100%
9. Belum adanya penataan kabel optik dan tiangnya sehingga jika dibiarkan terus menerus akan mengganggu estetika kota.
10. Belum ada pelaporan ke dinas yang menangani telekomunikasi dalam hal ini Dinkominfo sehingga kesulitan dalam pendataan, sejauh ini belum ada data banyaknya provider ISP yang ada di purbalingga, Luas area cakupan dan berapa KM kabel yang digelar serta berapa buah yang terpasang.
11. Dalam pemasangan kabel atau tiang kadangkala meninggalkan kaidah standar SNI, contoh, terkait kedalaman tiang yang aman sehingga tidak roboh, kemudian batas maksimal dalam satu titik bisa dipasang tiang.
12. Masih adanya para penyelenggara ISP yang belum berijin khususnya bagi yang menjual kembali jasa telekomunikasinya.
15. Kurangnya Dukungan Finansial, Kurangnya ketersediaan anggaran untuk kegiatan statistik menyebabkan beberapa kegiatan belum terlaksana, seperti Cetak Buku Statistik Metadata Variabel dan Indikator, Desk Satu Data yang seharusnya dilaksanakan oleh walidata tetapi realitanya masih dilaksanakan oleh Bappelitbangda, serta data yg diperoleh belum sampai level kecamatan dan instansi vertikal
16. Updating Data, belum melakukan updating data secara periodik sesuai dengan waktu rilis data
17. Kualitas Pengelolaan Data, Perlunya peningkatan kemampuan/ keterampilan Pengelolaan Data Statistik
18. Belum Memadainya Sarana dan Prasarana Perangkat yang digunakan untuk menghimpun, mengolah dan mendiseminasikan Data, hal ini menyebabkan hasil kinerja kurang maksimal.

Khusus di kegiatan Keamanan Informasi terdapat kendala antara lain:

1. SDM Persandian kurang memiliki kompetensi keamanan siber yang memadai
2. Belum masifnya implementasi kebijakan tata kelola persandian dan keamanan informasi
3. Belum adanya *blue print* tata kelola persandian dan keamanan informasi jangka panjang

4. Berita berklasifikasi belum terdokumentasi dengan baik
5. Belum diterapkannya Sertifikat Elektronik di lingkungan Desa/Kelurahan
6. Belum efektifnya Purbalinggakab-CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)
7. Belum diterapkan ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
8. Belum adanya data center yang memadai
9. Rendahnya Information Security Awareness di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
10. Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian
11. Rendahnya indeks KAMI di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga
12. Belum optimalnya Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI) di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga

2. Peluang:

- a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Purbalingga berbasis teknologi informasi;
- b. Kebutuhan pengembangan muatan *e-Government* sesuai karakteristik daerah di Kabupaten Purbalingga;
- c. Kesadaran masyarakat Kabupaten Purbalingga akan pentingnya data, informasi dan komunikasi;
- d. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga berbasis elektronik
- e. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan daerah.

2.3.5 Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Rekomendasi dan tindak lanjut bidang IKP pada kegiatan PPID yaitu:

- a) Review website PPID
- b) Persiapan materi 2024 (Perda, DIP, DIK)
- c) Sosialisasi/Bimbingan Teknis bagi OPD

Rekomendasi dan tindak lanjut bidang IKP pada kegiatan Pemeliharaan dan Pindah Lokasi Rangka Baliho yaitu:

- a) Pemindahan rangka di Karangreja
- b) Pemasangan (pindah lokasi) rangka bekas dari Taman Usman Janatin
- c) Pemeliharaan rangka di pintu masuk Pendopo Dipokusumo

Rekomendasi dan tindak lanjut lainnya bidang IKP yaitu:

- a) Pembuatan Baliho/Banner, menyesuaikan tema kegiatan dan rangka yang tersedia
- b) Pembuatan kalender rutin tahunan yang akan dibagi pada saat Hari Jadi dan Expo
- c) Mengganti nama medsos dinkominfo dan membuat akun baru untuk dinas sebagai pemenuhan kelengkapan dokumen penilaian PPID.

Rencana tindak lanjut dan rekomendasi bidang Informatika antara lain sebagai berikut:

1. Kesanggupan admin OPD untuk pengelolaan aplikasi
2. Digitalisasi layanan publik
3. Medsos Dinkominfo sbg PPID Pelaksana dengan admin masing-masing Bidang
4. Pengembangan Website PPID
5. Melanjutkan kegiatan “Jubah Baru” setiap hari Jum'at barokah berbagi ilmu di aula Dinkominfo dalam melayani pengaduan masyarakat.
6. Kelanjutan pelaksanaan dari Bimbingan Teknis *Smart City* yang dilaksanakan pada tahun 2024

Adapun rekomendasi rencana tindak lanjut bidang ITSP yaitu:

1. Sosialisasi kebijakan tata kelola persandian dan keamanan informasi.
2. Penyusunan blue print/rencana tata kelola persandian dan keamanan informasi yang *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound)*
3. Manajemen berita berklasifikasi dari email sanapati
4. Koordinasi dengan Desa/Kelurahan serta Dinarpus dalam implementasi TTE pada aplikasi Srikandi
5. Kesiapan infrastruktur dan SDM yang memenuhi pelaksanaan CSIRT
6. Sosialisasi kebijakan terkait SMKI dan inisiasi penerapan ISO 27001:2022 melalui pihak ke 3 pengelola data center
7. Penyusunan KAK dan pengadaan data center dan co-location
8. Bekerjama dengan Kementrian Kominfo melalui Program Digitalent.
9. Koordinasi dengan Diskominfo Provinsi dan BSSN terkait evaluasi pelaksanaan persandian.
10. Koordinasi Bersama Stakeholder untuk merumuskan tujuan dari Persandian daerah
11. Pengajuan asistensi Indeks KAMI dengan BSSN
12. Pengajuan sistensi TMPI dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Purbalinggakab-CSIRT.
13. Launching Purbalinggakab-CSIRT
14. Verifikasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi)
15. Inisiasi Audit Internal TIK SPBE (Infrastruktur, Aplikasi, Keamanan)

16. Sharing Knowledge dengan BRIN
17. Optimalisasi Jaring Komunikasi Sandi (Sanapati dan Srikandi)
18. Optimalisasi Penanganan Insiden Siber melalui Web:
<https://csirt.purbalinggakab.go.id/>
19. Sosialisasi *Cyber Security Awareness* kepada pelajar di Purbalingga
20. Implementasi Sertifikat Elektronik di Lingkup Desa
21. Peningkatan SDM Kamsider Purbalingga (Pelatihan JPT, SOC, CSIRT)
22. Melakukan Permohonan Permintaan Titik Koordinat Ke Tiap Tiap Pemilik BTS Menara Telekomunikasi
23. Melakukan Permohonan Permintaan Nomor IMB pada setiap Bangunan Menara Yang Telah Berdiri dan Masih Beroperasi
24. Kualitas Data, Beberapa data yang dikumpulkan masih belum memenuhi atribut kelengkapan metadata.
25. Belum Optimalnya Pemanfaatan Geoportal, Belum adanya web GIS yang dibangun berdasarkan pengembangan dari Geoportal
26. Portal Satu Data Daerah yang Bervariasi, Beberapa Kab/Kota hanya menggunakan CKAN sebagai Portal Satu Data, ada Juga yang melakukan Pemutakhiran dengan membangun Aplikasi Baru. Tentunya seharusnya ada kiat dari Pemprov/pusat untuk menstandarkan Portal Satu Data, seperti standarisasi Geoportal
27. Survei Kebutuhan Data, Pengisian Rekomendasi Statistik, Proses Validasi dan Penerbitan Rekomendasi, Validasi Data Geospasial, Proses Pemutakhiran Portal Satu Data Purbalingga

Rekomendasi dan tindak lanjut urusan LPPL RGS antara lain:

- a. Perlu adanya perbaikan tiang pancang dan peremajaan tower yang memadai atau pengecatan tower, dikarenakan kondisi saat ini tower sudah melintir dan belum pernah ada pengecatan ulang dari awal pembangunan.
- b. Perlu adanya pengadaan sparepart pemancar/booter berupa power supply untuk booster karena pada Tanggal 30 Januari 2019 Pukul 01:30 WIB terjadi kerusakan pada *Power Supply Booster* Pemancar dan sampai sekarang belum adanya pengadaan sparepart tersebut untuk mengganti dan untuk cadangan jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan kembali, dengan spesifikasi tegangan 48V/50V 50A.
- c. Perlu adanya pengadaan sparepart pemancar/booster berupa pallet fm blf188xr/mrflk25 untuk mengganti pallet booster jika sewaktu-waktu mati karena ada masa pakainya.
- d. Perlu adanya pengadaan UPS untuk membackup computer agar tidak langsung mati ketika listrik padam agar computer terutama hardisk tidak mudah rusak.

- e. Perlu adanya pengadaan alat audio management.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat kendala-kendala disamping adanya beberapa keterbatasan yang berpengaruh terhadap beberapa hal di atas.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan dokumen perencanaan berupa Renja OPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pada tingkat OPD sudah melalui proses dengan keterlibatan masyarakat secara luas, yaitu dengan melakukan inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui proses musrenbang.

Dari hasil pencermatan internal ada perbedaan antara jumlah anggaran yang diusulkan dengan jumlah anggaran pada rancangan RKPD. Adapun hasil dari proses yang dilakukan dalam rangka membandingkan rancangan awal dengan analisis kebutuhan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rewiew Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Progam/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11)	(12)
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Purbalingga	Presentase OPD yang memiliki website aktif	100%	593,724,000	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Purbalingga	Presentase OPD yang memiliki website aktif	100%	825.277.000	
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	593,724,000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	825.277.000	
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	278	254,650,000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	12	471.528.000	Pergeseran dari Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4	Pelayanan Informasi Publik	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	16	296,984,000	Pelayanan Informasi Publik	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi public	16	307.985.000	
5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Purbalingga	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	29	22,000,000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Purbalingga	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	41	20.000.000	
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Purbalingga	Jumlah dokumen kemiteraan dengan masyarakat, media, dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	14	20,090,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Purbalingga	Jumlah dokumen kemiteraan dengan masyarakat, media, dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	14	25.764.000	

7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Purbalingga	Cakupan Pelayanan Publik yang menggunakan aplikasi informatika	100%	845,884,600	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Purbalingga	Cakupan Pelayanan Publik yang menggunakan aplikasi informatika	100%	1.076.986.000	
8	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Indeks SPBE	3.5	23,658,800	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Indeks SPBE	3,55	21.508.000	
9	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Purbalingga	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	42	23,658,800	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Purbalingga	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	42	3.508.000	
10	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Purbalingga	Jumlah Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas yang dikembangkan	0	-	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Purbalingga	Jumlah Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas yang dikembangkan	1	20,000,000	Untuk mendukung kegiatan pendampingan Smart City dari pemerintah pusat TA. 2025
11	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Purbalingga	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	0	-	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Purbalingga	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1	20,000,000	Untuk mendukung kegiatan pendampingan Smart City dari pemerintah pusat TA. 2025
12	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah website dan sub domain OPD yang terpelihara dan yang update	55	882,225,800	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah website dan sub domain OPD yang terpelihara dan yang update	55	1.0255.478.000	
13	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	121	22,000,000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	121	20.000.000	
14	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Purbalingga	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8	800,225,800	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Purbalingga	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8	1.035.478.000	Anggaran pada tahun 2024 bertambah 408.000.000,- untuk pembelian 2 unit server. Pada tahun 2025 berkurang Rp.200.000..000.

15	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Purbalingga	Presentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar	100%	43,525,000	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Purbalingga	Presentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar	100%	39.568.000	
16	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data Sektoral sesuai standar	100%	43,525,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data Sektoral sesuai standar	100%	39.568.000	
17	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar	Purbalingga	Jumlah Proses Bisnis Statistik sektoral	280		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar	Purbalingga	Jumlah Proses Bisnis Statistik sektoral	1	23.119.000	Penggabungan dari Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dan Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur
18	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Purbalingga	Jumlah metadata Statistik sektoral	1	7,040,000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Purbalingga	Jumlah metadata Statistik sektoral	0	0	Menjadi Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
19	Pengembangan Infrastruktur	Purbalingga	Jumlah infrastruktur statistik	29	18,391,000	Pengembangan Infrastruktur	Purbalingga	Jumlah infrastruktur statistik	0	0	Menjadi Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
20	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Purbalingga	Jumlah Data Statistik Sektoral		18,094,000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Purbalingga	Jumlah Data Statistik Sektoral	29	16.449.000	
21	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Purbalingga	Persentase Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	100%	54,061,000	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Purbalingga	Persentase Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	100%	49.148.000	
22	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase operasional jaring komunikasi Pemerintah Daerah	100%	36,528,000	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase operasional jaring komunikasi Pemerintah Daerah	100%	33.208.000	
23	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	18,264,000	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	16.604.000	

24	Penatalaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	18,264,000	Penatalaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	16.604.000	
25	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Presentase operasional jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah	100%	17,533,000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Presentase operasional jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah	100%	15.940.000	
26	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	1	17,533,000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	1	15.940.000	
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja - Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti - Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah - Persentase pengelolaan administrasi asset milik Daerah sesuai ketentuan - Persentase pengadaan barang milik daerah - Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 	100%	6.340.390.400	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja - Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti - Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah - Persentase pengelolaan administrasi asset milik Daerah sesuai ketentuan - Persentase pengadaan barang milik daerah - Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 	100%	6.089.560.000	
28	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	4,017,200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	3.652.000	
29	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2	2,191,200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2	1.992.000	

30	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	1,826,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	1.660.000	
31	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentun	100%	5,330,892,760	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentun	100%	5.299.833.000	
32	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah Orang yang meneri gaji dan tunjangan ASN	42	5,230,737,600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah Orang yang meneri gaji dan tunjangan ASN	42	5.208.782.000	
33	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	24	62,596,160	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	24	56.906.000	
34	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	4	37,559,000	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	4	34.145.000	
35	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	257,818,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	93.380.000	
36	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Purbalingga	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	10	-	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Purbalingga	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	10	5.000.000	
37	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Purbalingga	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	133	257,818,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Purbalingga	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	133	88.380.000	Bergeser ke Pengelolaan Media Komunikasi Publik
38	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	100%	44,918,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	100%	30.835.000	
39	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purbalingga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2,200,000	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purbalingga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2.000.000	
40	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	27,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	15.000.000	Dikurangi Rp 10 juta digeser ke Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

41	Fasilitasi kunjungan tamu	Purbalingga	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	8,800,000	Fasilitasi kunjungan tamu	Purbalingga	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	8.000.000	
42	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	4,227,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	3.843.000	
43	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12	2,191,000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12	1.992.000	
44	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	100%	2,191,000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	100%	1.992.000	
45	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	4	2,191,000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	4	1.992.000	
46	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	590,014,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	554.377.000	
47	Penyediaan jasa surat menyurat	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	355,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	323	
48	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	60,911,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	55.374.000	
49	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1,100,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1.000.000	
50	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	527,648,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	497.680.000	

51	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Presentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Presentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10.000.000	
52	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2	-	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2	10.000.000	mendapat geseran dari Sub Kegiatan Logistik senilai Rp 10 juta untuk membeli Alat Scanner
53	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100%	110,539,440	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100%	95.491.000	
54	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	104,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	90.000.000	
55	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	3,839,440	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	3.491.000	
56	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	1	2,200,000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	1	2.000.000	

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan pada Rancangan awal RKPD Tahun 2024 dan pada hasil analisis kebutuhan diantaranya:

1. Pada sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan anggaran tahun 2025 berkurang sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) dan beralih ke Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik. Hal ini mengacu kepada arahan Kementerian untuk menggeser anggaran tersebut di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang sudah ada wadah untuk menampung aktivitas DBHCHT berupa iklan gempur rokok ilegal.
2. Pada Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik anggaran tahun 2025 berkurang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan bergeser ke Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, guna keperluan pembelian 2 unit scanner untuk menunjang kegiatan perencanaan dan keuangan yang dalam kegiatannya sangat membutuhkan peralatan scanner.
3. Pada Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, anggaran tahun 2025 berkurang Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) karena anggaran untuk pengadaan server sudah terpenuhi di anggaran tahun 2024.
4. Munculnya Sub kegiatan baru pada anggaran 2025 yaitu Sub kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar yang merupakan penggabungan dari Sub kegiatan lama di tahun anggaran 2024 yaitu Sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dan Pengembangan Infrastruktur. Hal ini dikarenakan pada SIPD RI sudah tidak muncul dua Sub kegiatan tersebut di atas.
5. Hilangnya Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dan Pengembangan Infrastruktur di anggaran tahun 2025 dan beralih ke Sub kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar. Hal ini dikarenakan pada SIPD RI sudah tidak muncul dua Sub kegiatan tersebut di atas.
6. Pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, muncul dua Sub kegiatan baru yaitu Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas dan Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE untuk mendukung kegiatan pendampingan Smart City dari pemerintah pusat TA. 2025.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan pembangunan adalah dengan menggunakan sistem pembangunan yang bersifat *Bottom-Up*. *Bottom-Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan

dimana atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam hal ini atasan merupakan pemerintah dan bawahan merupakan masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan.

Program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam satu rumpun Infrastruktur Pembangunan Wilayah/IPW disampaikan dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah/Forum OPD sebelum dilaksanakannya Musrenbang Kabupaten. Pembahasan program dan kegiatan antar OPD bersama masyarakat ini dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Usulan program dan kegiatan masyarakat disampaikan oleh masyarakat di Forum OPD yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD yang berkompeten di bidangnya. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk keselarasan usulan masyarakat dalam pelaksanaan oleh OPD terkait serta sebagai langkah optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan dan sinergitas antar OPD dalam pelaksanaannya, khususnya di rumpun IPW.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga saat ini belum ada jaring aspirasi DPRD Kabupaten Purbalingga terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Namun dalam hal ini terdapat sepuluh usulan aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sebagai hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Dinkominfo Kabupaten Purbalingga bersedia sebagai narasumber dalam kegiatan yang menjadi usulan/aspirasi masyarakat dari desa/kelurahan terkait tupoksi Dinkominfo dengan anggaran kegiatan dari desa/kelurahan yang mengusulkan aspirasi kegiatan tersebut.

USULAN MUSRENBANG KECAMATAN 2024

Usulan masyarakat disalurkan dan ditampung dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa/musrenbang desa berlanjut dengan musrenbang kecamatan. Usulan selanjutnya disampaikan dalam musrenbang kabupaten. Usulan masyarakat tersebut ditujukan kepada OPD sesuai pengelompokan tupoksi masing-masing OPD. Usulan yang berkaitan dengan tupoksi Dinkominfo sebagian besar merupakan permintaan pelatihan bidang komunikasi informatika. Ada sembilan usulan masyarakat yang ditampung Dinkominfo dari hasil musrenbang. Berikut daftar usulan masyarakat hasil musrenbang:

Tabel 3.1 **Daftar Usulan Masyarakat Hasil Musrenbang 2024**

Nama Pengusul	No Urut Usulan	ID USULAN
Drs. BAMBANG TEGUH WAHYONO	1345	1281719
KAMSIR, S.Sos	2037	1311346
KUWATNO, S.Pd.I	1232	1274949
RETNO HENDARWATI	285	1228587
ROMIDI	387	1233152
SOBIR HERMAWAN	184	1222192
SUNARNO, S.Hi	835	1256678
SUNYOTO	855	1257204
SUWARTO	411	1234027

REKOMENDASI DINKOMINFO:

Usulan dianggarkan pada ADD masing-masing lokus usulan, Dinkominfo Kabupaten Purbalingga bersedia menjadi narasumber pelatihan. Usulan program dan kegiatan masyarakat selengkapnya dalam tabel berikut:

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kertanegara	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	-	
					2
3		Karangjambu			

4	Bobotsari				1232	1274949
				RETNO HENDARWATI	285	1228587
				Pelatihan bidang komunikasi informatika	285	1228587
				melek teknologi	285	1228587
				Bobotsari	285	1228587
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	285	1228587
				Verifikasi Perangkat Daerah	285	1228587
				-	285	1228587
				-	285	1228587
				ROMIDI	387	1233152
				Pelatihan bidang komunikasi informatika	387	1233152
				Pelatihan Digital Marketing dan Keterampilan Berbasis Teknologi Informasi dibutuhkan oleh warga Desa untuk memperluas jaringan pemasaran produk warga Desa dan peningkatan keterampilan dibidang teknologi digital	387	1233152
				Karanganyar	387	1233152
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	387	1233152
				Verifikasi Perangkat Daerah	387	1233152
				-	387	1233152
				-	387	1233152
				SOBIR HERMAWAN	184	1222192
				Pelatihan bidang komunikasi informatika	184	1222192
				Masih kurangnya wawasan dibidang komunikasi informatika	184	1222192
				Pengadegan	184	1222192
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	184	1222192
				Verifikasi Perangkat Daerah	184	1222192
				-	184	1222192
				-	184	1222192
				SUNARNO, S.Hi	835	1256678
				Pelatihan bidang komunikasi informatika	835	1256678
				Masih kurangnya pengetahuan IPTEK	835	1256678
				Pengadegan	835	1256678
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	835	1256678
				Verifikasi Perangkat Daerah	835	1256678
				-	835	1256678
				-	835	1256678

8		Mrebet			SUNYOTO	855	1257204
					Pelatihan bidang komunikasi informatika	855	1257204
					Gadget kebanyakan hanya untuk bermain game, lebih baik memanfaatkan gadget untuk kegiatan produktif	855	1257204
					Mrebet	855	1257204
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	855	1257204
					Verifikasi Perangkat Daerah	855	1257204
					-	855	1257204
					-	855	1257204
9		Karang Jambu			SUWARTO	411	1234027
					Pelatihan bidang komunikasi informatika	411	1234027
					Minimnya pengetahuan tentang bidang komunikasi dan informatika	411	1234027
					Karangjambu	411	1234027
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	411	1234027
					Verifikasi Kecamatan	411	1234027
					-	411	1234027
					-	411	1234027
					Grand Total	7571	11299854

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat, dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital;
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yang selaras dengan salah satu sasaran RPD Tahun 2024-2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis ditetapkan tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yang merupakan perumusan fokus program dan kegiatan strategis.

Tujuan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yaitu Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- 2) Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral dan geospasial;
- 3) Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah digital Jawa Tengah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinkominfo

DINKOMINFO merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah. Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dilakukan melalui misi ke-1, yaitu: Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel, dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik, indikator tujuan indeks reformasi birokrasi dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan indikator sasaran nilai saki.

Adapun urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki tujuan mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* melalui pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik dengan sasaran:

1. Meningkatnya integrasi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator sasaran indeks keterbukaan informasi publik dan meningkatnya pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi.
2. Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat dengan indikator sasaran persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah
3. Meningkatkan keamanan informasi dengan indikator sasaran tingkat keamanan informasi Pemerintah.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo adalah mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tujuan dan sasaran Dinkominfo Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1.

TUJUAN DAN SASARAN DINKOMINFO KAB. PURBALINGGA

No	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks SPBE	Poin	3,50	3,55
		Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	Poin	94	94,5
		Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat	Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah	Persen	100	100
		Meningkatnya keamanan informasi	Tingkat Keamanan Informasi Daerah	Nilai	315	316
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan DINKOMINFO		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	43	44
		Meningkatkan implementasi SAKIP DINKOMINFO	Nilai SAKIP Dinkominfo	Indeks	72,76	73

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

a) VISI KEPALA DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu dinas daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah, dalam rangka turut berperan serta mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 adalah “*PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA*”.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan, dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, juga disusun tujuh misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

b) MISI KEPALA DAERAH

Misi yang berkaitan dengan tugas Dinkominfo, terdapat pada satu misi, yakni: Misi ke-1: *Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.*

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari **misi ke-1** tersebut adalah terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kapasitas pemerintah daerah. Salah satu fungsi Dinkominfo yang berkaitan dengan misi ini yakni urusan persandian. Bidang Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, statistik dan persandian urusan persandian melalui santel, menyampaikan informasi yang diterima santel kepada pihak terkait/seluruh OPD penerima informasi.

Salah satu tujuan misi ini yang berkaitan dengan fungsi Dinkominfo yaitu meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik, dengan sasaran meningkatnya implementasi e-Government dan keterbukaan informasi publik.

3.3.2 Sustainable Development Goals /SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi tujuan pembangunan yang disepakati negara Anggota PBB. Terdapat 169 capaian yang terukur dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Salah satu tujuan dalam SGD's adalah pendidikan, namun di masa pandemi Covid-19, pendidikan sebagaimana sektor lainnya mengalami turbulensi. Untuk mewujudkan SDGs, saat ini Pemerintah tengah membangun tiga layer infrastruktur, aplikasi, dan literasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

* INFRASTRUKTUR

Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh infrastruktur telekomunikasi bisa menjangkau pelosok tanah air di daerah-daerah pedesaan, rural, dsb. Presiden menyampaikan Lima Percepatan Transformasi Digital dan salah satunya adalah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Infrastruktur yang dikelola Dinkominfo Kabupaten Purbalingga diantaranya:

- **Dinkominfo Data Center** yang terletak di SETDA Purbalingga. Server 2U/1U total 8 unit dengan kapasitas hingga 100 vcpu.
- **Pusat Data Nasional** yang merupakan Fasilitas Cloud Pemerintah milik Kementrian Kominfo untuk Tenant Pemkab-Purbalingga dimana memiliki kapasitas hingga **57 VM/Server (virtual machine), CPU: 127 GHz, RAM: 208 GB dan Storage: 10,1 TB.**
- **Pusat Data Provinsi** merupakan Fasilitas cloud milik Pemprov Jateng untuk Pemkab Purbalingga dimana memiliki kapasitas **8 VM/Server, CPU: 54 Core, RAM: 80GB dan Storage: 1,8 TB**

- Jaringan : a. Jaringan Metro ke beberapa OPD.
- b. IP Public hingga /23 (510 IP Public)
- c. Perangkat Jaringan Highend:
- 1) RouterCore
 - 2) Switch
 - 3) Access Point
 - 4) Repeater
 - 5) Zabbix monitoring
 - 6) OLT Fiber optik

Dalam infrastruktur yang dikelola, Dinkominfo Kabupaten Purbalingga juga mengembangkan SID Desa & desa.id di desa-desa se-Kabupaten Purbalingga. Presentase Capaian Penerapan SID Desa dan desa.id Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

- 1. SID Desa,
Jumlah Desa yang sudah menerapkan SID adalah **78** dari total 224 desa di Kabupaten Purbalingga, atau sekitar 34,82%.
- 2. Presentase Update SID,
Jumlah SID yang aktif mengupdate datanya adalah **46** dari total 78 SID di Kabupaten Purbalingga, atau sekitar 58,97%.
- 3. desa.id,
Jumlah Desa yang sudah menerapkan desa.id adalah **126** dari total 224 desa di Kabupaten Purbalingga, atau sekitar 56,25%.
- 4. Presentase Update desa.id,
Jumlah desa.id yang aktif mengupdate datanya adalah **51** dari total 126 desa.id di Kabupaten Purbalingga, atau sekitar 40,47%.

• **APLIKASI**

Aplikasi yang sudah dibuat Dinkominfo Kabupaten Purbalingga di tahun 2023 dijelaskan berikut ini:

Tabel 3.2
Aplikasi yang sudah dibuat Dinkominfo Kabupaten Purbalingga di tahun 2023

NO	APLIKASI	Tahapan	Keterangan
1	Pamuraja/Gaspol Uapike	Selesai	
2	Silakonbima	Selesai	
3	Satset	Selesai	
4	Alpukat	Selesai	
5	Siregol	Selesai	
6	JDIH Mobile	Selesai	

7	Si Pakis Bangga	Selesai	
8	Purbalingga Juara	Selesai	
9	Monata	Selesai	
10	Sang Pentolan	Selesai	
11	Siska Pedes	Selesai	
12	Sim pandata	Selesai	
13	E-akun	Selesai	
14	Satu Data Pendidikan dan Kebudayaan	Proses	<ul style="list-style-type: none">• mou dg kemendikbud pusdatin pengembangan aplikasi 2024 instal server di Dindikbud
15	Pengembangan JDIH	Proses	<ul style="list-style-type: none">• Link anggota-anggota JDIH di website JDIH• Penambahan link JDIH di Sub domain website OPD (Fikri)• Selasa 9 januari 2024 koordinasi dengan bagian hukum
16	Sipetarung	Proses	<ul style="list-style-type: none">• reviu terakhir tgl 4 dan 7 desember 2023 dan sudah ditindaklanjuti, kurang fitur import koordinat• Selesai analisis tahap 3 oleh kepala bidang• pengesahan dengan TTE, menunggu penyesuaian sesuai kriteria di aplikasi terlebih dahulu
17	E-cuti	Proses	awal tahun 2024 sudah diujicobakan untuk cuti tahunan
18	Pesona	Proses	<ul style="list-style-type: none">• backend sudah selesai• frontend kurang modul cetak (luthfi)• Domain belum dibuat• minio sudah jadi
19	E-Sakip	Proses	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi dengan bappelitbangda
20	TJSLP	Proses	<ul style="list-style-type: none">• Halaman depan sudah dibuat• User perusahaan belum dibuat
21	Simply-KS	Antrian	
22	Sinta Lan Rama	Antrian	
23	Sistem Informasi Pengajuan Penyaluran DD	Antrian	

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam program-program kegiatan yang terdiri dari 5 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Guna memperlancar pelaksanaan program dan sasaran tersebut di atas, maka dilaksanakan 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan E-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektor di lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, situasi, dan kondisi serta adanya isu strategis yang harus dijalankan, maka di tahun anggaran 2025 dimunculkan beberapa sub kegiatan baru yang tadinya belum muncul. Diantara Sub Kegiatan yang baru muncul tersebut adalah:

- 1. Sub kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dimunculkan karena adanya kebutuhan mendesak peralatan scan untuk menunjang kegiatan keuangan dan lainnya.
- 2. Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas dan sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE. Sub kegiatan ini dimunculkan karena sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan yang berkaitan dengan *Smart City*.
- 3. Sub kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektorial sesuai Standar. Sub kegiatan ini dimunculkan untuk mengantisipasi dua sub kegiatan yang belum terakomodir di SIPD RI yaitu Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektorial dan Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur.

Gambaran lengkap dari program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut di atas dalam tabel di bawah ini:

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Progam dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Rencana Tahun)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase OPD yang memiliki website aktif	Purbalingga	100%	685.277.000	DAU		100%	825.277.000
2.16.02.2.201	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	100%	685.277.000	DAU		100%	825.277.000
2.16.02.2.201.005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	Purbalingga	278	331.528.000	DAU	Pergeseran dari Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	12	471.528.000
2.16.02.2.201.006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi public	Purbalingga	16	307.985.000	DAU		16	307.985.000
2.16.02.2.201.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	Purbalingga	29	20.000.000	DAU		41	20.000.000
2.16.02.2.201.00120	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemiteraan dengan masyarakat, media, dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	Purbalingga	14	25.764.000	DAU		14	25.764.000
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Pelayanan Publik yang menggunakan aplikasi informatika	Purbalingga	100%	1.276.986.000	DAU		100%	1.076.986.000
2.16.03.2.02.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	Purbalingga	3.5	21.508.000	DAU		3,55	21.508.000
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Purbalingga	42	21.508.000	DAU		42	3.508.000
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas yang dikembangkan	Purbalingga	0	0	DAU	Untuk mendukung kegiatan pendampingan Smart City dari pemerintah pusat th. 2025	1	10,000,000

2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Purbalingga	0	0	DAU	Untuk mendukung kegiatan pendampingan Smart City dari pemerintah pusat th. 2025	1	8,000,000
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah website dan sub domain OPD yang terpelihara dan yang update	Purbalingga	55	1.255.478.000	DAU		55	1.0255.478.000
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	Purbalingga	121	20.000.000	DAU		121	20.000.000
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Purbalingga	8	1.235.478.000	DAU		8	1.035.478.000
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar	Purbalingga	100%	39.568.000	DAU		100%	39.568.000
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data Sektoral sesuai standar	Purbalingga	100%	39.568.000	DAU		100%	39.568.000
2.20.02.2.01.0001	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar	Jumlah Proses Bisnis Statistik sektoral	Purbalingga	280	0	DAU	Penggabungan dari Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dan Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	1	23.119.000
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata Statistik sektoral	Purbalingga	1	6.400.000	DAU	Menjadi Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	0	0
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur statistik	Purbalingga	29	16.719.000	DAU	Menjadi Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	0	0
2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral	Purbalingga		16.449.000	DAU		29	16.449.000
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Purbalingga	100%	49.148.000	DAU		100%	49.148.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase operasional jaring komunikasi Pemerintah Daerah	Purbalingga	100%	33.208.000	DAU		100%	33.208.000
2.21.02.2.01.0001	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	1	16.604.000	DAU		1	16.604.000
2.21.02.2.01.0002	Penatalaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	2	16.604.000	DAU		2	16.604.000
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase operasional jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah	Purbalingga	100%	15.940.000	DAU		100%	15.940.000
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	Purbalingga	1	15.940.000	DAU		1	15.940.000

2.16.01.2.06	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Purbalingga	1	1.992.000	DAU		1	1.992.000
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	Purbalingga	100%	1.992.000	DAU		100%	1.992.000
2.16.01.2.0006	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	Purbalingga	4	1.992.000	DAU		4	1.992.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Purbalingga	100%	554.377.000	DAU		100%	554.377.000
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	2	323.000	DAU		2	323.000
2.16.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Purbalingga	12	55.374.000	DAU		12	55.374.000
2.16.01.2.0808	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purbalingga	1	1.000.000	DAU		1	1.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	12	497.680.000	DAU		12	497.680.000
2.16.01.2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	0%	0	DAU		100%	10.000.000
2.16.01.2.01.0001	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Purbalingga	2	0	DAU	mendapat geseran dari Sub Kegiatan Logistik senilai Rp 10 juta untuk membeli Alat Scanner	2	10.000.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Purbalingga	100%	95.491.000	DAU		100%	95.491.000
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Purbalingga	16	90.000.000	DAU		16	90.000.000
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Purbalingga	12	3.491.000	DAU		12	3.491.000
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	Purbalingga	1	2.000.000	DAU		1	2.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) didukung pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

Rumusan program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024		CAPAIAN Jan-April 2024	TARGET 2025		CAPAIAN TW IV	KET.
				Nilai/ Indeks/ Persen	(Rp.)	%	Nilai/ Indeks/ Persen	(Rp.)	2025	
I	TUJUAN: Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip- prinsip Good Governance melalui Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE	Indeks	3.5	8.280.539.000	38,82	3,55	8.080.539.000	3.55	Penilaian dari BSSN pada awal tahun berikutnya (TUJUAN)
I.A.	SASARAN: Meningkatnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	94	1.962.263.000	28,64	94	1.902.263.000	94	Penilaian dari Komisi Informasi Publik pada akhir tahun berjalan
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase OPD yang memiliki website aktif	Persen	100%	685.277.000	18,25	100%	825.277.000	100%	PROGRAM
1.1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100%	685.277.000	18,25	100%	825.277.000	100%	KEGIATAN
1.1.1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	Dokumen	153	331.528.000	32,43	154	471.528.000	153	SUB KEGIATAN
1.1.2.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	Dokumen	16	307.985.000	35,06	16	307.985.000	16	SUB KEGIATAN
1.1.3.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	Orang	29	20.000.000	5,05	41	20.000.000	41	SUB KEGIATAN
1.1.4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemiteraan dengan masyarakat, media, dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	Dokumen	14	25.764.000	0	0	0	0	SUB KEGIATAN

1.1.5	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah dokumen kemiteraan dengan masyarakat, media, dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	Dokumen	0	0	0	14	25.764.000	14	SUB KEGIATAN
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Pelayanan Publik yang menggunakan aplikasi informatika	Persen	100%	1.276.986.000	39,02	100%	1.076.986.000	100%	PROGRAM
2.1.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	Indeks	3.5	21.508.000	49,25	3,55	1.056.986.000	3.55	KEGIATAN
2.1.1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Unit	42	21.508.000	49,25	0	0	0	SUB KEGIATAN
2.1.2	Pembangunan dan /atau Pengembangan Aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Unit	42	0	0	42	21.508.000	42	SUB KEGIATAN
2.1.3	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	0	0	0	8	995.478.000	8	SUB KEGIATAN
2.1.4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas yang dikembangkan	Unit	0	0	0	1	20.000.000	1	SUB KEGIATAN
2.1.5	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Unit	0	0	0	1	20.000.000	1	SUB KEGIATAN
2.2.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah website dan sub domain OPD yang terpelihara dan yang update	Instansi	55	1.255.478.000	28,79	55	20.000.000	55	KEGIATAN
2.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen	121	20.000.000	2	0	0	0	SUB KEGIATAN
2.2.2	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan nama Domain Desa	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen	0	0	0	121	20.000.000	121	SUB KEGIATAN
2.2.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	8	1.235.478.000	55,83	0	0	0	SUB KEGIATAN
I.B.	SASARAN: Meningkatnya ketersediaan Data pada Portal Satu Data Daerah yang dapat diakses Masyarakat	Presentase Ketersediaan Data Pada Portal Satu Data Daerah	Persen	40%	39.568.000	16,72	100%	39.568.000	100%	KEGIATAN
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar	Persen	100%	39.568.000	16,72	100%	39.568.000	100%	PROGRAM

3.1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data Sektoral sesuai standar	Persen	100%	39.568.000	16,72	100%	39.568.000	100%	KEGIATAN
3.1.1.	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar	Jumlah Proses Bisnis Statistik sektoral	Dokumen	0	0	0	1	23.119.000	1	SUB KEGIATAN
3.1.1.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata Statistik sektoral	Dokumen	280	6.400.000	16,41	0	0	0	SUB KEGIATAN
3.1.2.	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur statistik	Unit	1	16.719.000	0	0	0	0	SUB KEGIATAN
3.1.3.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral	Dokumen	29	16.449.000	17,02	0	0	0	SUB KEGIATAN
3.1.4.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Data Statistik Sektoral	Dokumen	0	0	0	29	16.449.000	29	SUB KEGIATAN
I.C.	SASARAN: Meningkatnya Keamanan Informasi	Presentase Pengamanan Informasi Daerah	Nilai	315	49.148.000	13,76	316	49.148.000	316	Penilaian dari BSSN pada awal tahun berikutnya
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Persen	100%	49.148.000	13,76	100%	49.148.000	100%	PROGRAM
4.1.	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase operasional jaring komunikasi Pemerintah Daerah	Persen	100%	33.208.000	17,48	100%	33.208.000	100%	KEGIATAN
4.1.1.	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	16.604.000	8,10	1	16.604.000	1	SUB KEGIATAN
4.1.2.	Penatalaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2	16.604.000	26,86	2	16.604.000	2	SUB KEGIATAN
4.2.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase operasional jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah	Persen	100%	15.940.000	10,04%	100%	15.940.000	100%	KEGIATAN
4.2.1.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	Perangkat Daerah	1	15.940.000	10,04	1	15.940.000	1	SUB KEGIATAN
II.	TUJUAN: Meningkatnya kualitas kelembagaan DINKOMINFO	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	43	6.229.560.000	0	44	6.089.560.000	44	Variabel Kematangan Organisasi Dinkominfo
I.A.	SASARAN: Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinkominfo	Nilai SAKIP Dinkominfo	Indeks	72,76	6.229.560.000	72,76	73	6.089.560.000	73	Penilaian dari Inspektora t
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja - Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti - Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah - Persentase pengelolaan administrasi aset milik Daerah sesuai ketentuan - Persentase pengadaan barang milik daerah	Persen	100%	6.229.560.000	10,67%	100%	6.089.560.000	100%	PROGRAM

		- Persentase Pemeliharaan Milik Daerah	Barang							
5.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	Persen	100%	3.652.000	39,76	100%	3.652.000	100%	KEGIATAN
5.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.992.000	0	2	1.992.000	2	SUB KEGIATAN
5.1.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	1.660.000	39,76	4	1.660.000	4	SUB KEGIATAN
5.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentun	Persen	100%	5.299.833.000	18,79	100%	5.299.833.000	100%	KEGIATAN
5.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang meneri gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	42	5.208.782.000	40,79	42	5.208.782.000	42	SUB KEGIATAN
5.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	56.906.000	9,91	24	56.906.000	24	SUB KEGIATAN
5.2.3.	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen	4	34.145.000	5,68	4	34.145.000	4	SUB KEGIATAN
5.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100%	233.380.000	6,5	100%	93.380.000	100%	KEGIATAN
5.3.1.	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	10	5.000.000	0	10	5.000.000	10	SUB KEGIATAN
5.3.2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	228.380.000	6,5	200	88.380.000	200	SUB KEGIATAN
5.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	Persen	100%	40.835.000	6,90	100%	30.835.000	100%	KEGIATAN
5.4.1.	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	0	1	2.000.000	1	SUB KEGIATAN
5.4.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	25.000.000	3,26	12	15.000.000	12	SUB KEGIATAN
5.4.3.	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	8.000.000	0	12	8.000.000	12	SUB KEGIATAN
5.4.4.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	3.843.000	31,23	12	3.843.000	12	SUB KEGIATAN
5.4.5.	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1.992.000	0	1	1.992.000	1	SUB KEGIATAN
5.5.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	Persen	100%	1.992.000	0	100%	1.992.000	100%	KEGIATAN
5.5.1.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	Laporan	4	1.992.000	0	4	1.992.000	4	SUB KEGIATAN
5.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100%	554.377.000	8,51	100%	554.377.000	100%	KEGIATAN
5.6.1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	323.000	1	1	323.000	1	SUB KEGIATAN

5.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	55.374.000	16,81	12	55.374.000	12	SUB KEGIATAN
5.6.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	1.000.000	1	1	1.000.000	1	SUB KEGIATAN
5.6.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	497.680.000	22,80	12	497.680.000	12	SUB KEGIATAN
5.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	0	0	0	100%	10.000.000	100%	KEGIATAN
5.7.1.	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	2	10.000.000	2	SUB KEGIATAN
5.8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Persen	100%	95.491.000	4,91	100%	95.491.000	100%	KEGIATAN
5.8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	90.000.000	14,73	13	90.000.000	13	SUB KEGIATAN
5.8.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	6	3.491.000	6	6	3.491.000	6	SUB KEGIATAN
5.8.3.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	Unit	1	2.000.000	1	1	2.000.000	1	SUB KEGIATAN

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2025 terdapat lima pergeseran anggaran/perubahan rekening sub kegiatan terutama dalam satu Sub Kegiatan dan satu pergeseran anggaran/perubahan nama sub Kegiatan dalam satu Program. Pergeseran anggaran/perubahan rekening Sub Kegiatan pada tahun 2025 tersebut diantaranya yaitu:

1. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas berubah rekening menjadi Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat dengan pagu anggaran tetap sebesar Rp.25.764.000,-
2. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik berubah rekening menjadi Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran tetap sebesar Rp.21.508.000,-
3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.235.478.000,- bergeser dan berubah rekening menjadi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 995.478.000,-, Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas sebesar Rp. 20.000.000,-, dan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE sebesar Rp. 20.000.000,-. Pagu Anggaran Sub

Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar RP.200.000.000,- dari tahun anggaran sebelumnya.

4. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berubah rekening menjadi Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan nama Domain Desa dengan pagu anggaran tetap sebesar Rp.20.000.000,-
5. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.400.000,- dan Pengembangan Infrastruktur dengan pagu anggaran sebesar Rp.16.719.000,- bergabung dan berubah rekening menjadi Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar dengan pagu anggaran menjadi sebesar Rp.23.119.000,-
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah berubah rekening menjadi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dengan pagu anggaran tetap sebesar Rp.16.449.000,-

BAB V PENUTUP

Kebijakan dan program yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal dan mencapai sasaran, dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Keberhasilan pelaksanaannya akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak, terutama seluruh pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga.

Penyusunan Renja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, didasarkan pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan berbagai kebijakan umum pembangunan Kominfo, Persandian serta Statistik dengan memperhatikan berbagai perkembangan isu-isu terutama dalam mendukung pelayanan pemerintah daerah berbasis elektronik dan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Renja Dinkominfo tahun 2025 fokus pada penguatan integrasi TIK karena didorong oleh perkembangan TIK global yang mendorong kebutuhan teknologi digital sangat penting, dimana salah satunya melalui pembangunan pusat data (Data Center). Hal ini menjadi bagian penting yang terpadu dan tersinkronisasi dalam arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi rencana kegiatan dalam Renja tahun 2025 telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Forum gabungan OPD serta Musrenbang Kabupaten.

Renja tahun 2025 merupakan acuan bagi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam pembangunan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja tahun 2025 sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai di lingkungan Dinkominfo termasuk masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program program dan kegiatan yang tertuang dalam renja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Renja Tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman bagi pejabat di lingkungan Dinkominfo dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
3. Masyarakat Luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

4. Pada akhir tahun anggaran 2025. Setiap bidang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala bidang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu, serta adanya dukungan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di internal Diskominfo beserta seluruh pemangku kepentingan terkait, diharapkan langkah-langkah pencapaian kinerja dapat lebih *agile* dan tepat sasaran, sehingga kinerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dapat semakin fokus dalam menyelesaikan berbagai permasalahan aktual dan mencapai *outcome* yang diharapkan.

Purbalingga, Juni 2024

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650519 198803 2006

